



Rio Darma<sup>1</sup>

## EFEKTIVITAS MANAJEMEN PUBLIK DALAM MENGATASI KESENJANGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

### Abstrak

Urgensinya kebijakan yang adaptif dan pengontrolan yang berkelanjutan dalam pelaksanaan program pendidikan di berbagai wilayah Indonesia. Keberhasilan dan tantangan yang masih perlu diatasi untuk mencapai kesetaraan pendidikan di seluruh Indonesia. Maka, sangat diperlukan efektivitas manajemen publik untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data utama dalam penelitian ini adalah artikel-artikel jurnal ilmiah dan laporan hasil penelitian terkait topik efektivitas manajemen publik dalam pendidikan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1). Efektivitas kebijakan manajemen publik dalam mengurangi kesenjangan akses pendidikan di Indonesia adalah bahwa kebijakan manajemen publik, seperti alokasi anggaran dan desentralisasi pendidikan, telah berkontribusi dalam memperluas akses pendidikan, terutama melalui bantuan dana dan program khusus di daerah terpencil. Namun, efektivitasnya masih terbatas di wilayah dengan kendala infrastruktur, yang menunjukkan perlunya penyesuaian kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi lokal. 2). Faktor-faktor manajemen publik yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan dalam mengatasi ketimpangan pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh alokasi anggaran yang tepat sasaran, kualitas sumber daya manusia di tingkat lokal, kemitraan pusat-daerah yang kuat, serta pemantauan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas manajemen lokal menjadi kunci untuk memastikan kebijakan mencapai hasil yang optimal. 3). Perbedaan efektivitas program pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia adalah bahwa program pendidikan lebih efektif di perkotaan karena dukungan infrastruktur dan kualitas tenaga pendidik yang lebih baik. Di pedesaan, keterbatasan akses dan fasilitas menurunkan efektivitas program, menunjukkan perlunya kebijakan khusus yang mengatasi tantangan di wilayah terpencil.

**Kata Kunci:** Manajemen Publik, Kesenjangan Pendidikan, Indonesia

### Abstract

The urgency of adaptive policies and sustainable control in the implementation of education programs in various regions of Indonesia. Successes and challenges that still need to be overcome to achieve educational equality throughout Indonesia. Therefore, effective public management is needed to overcome it. This study uses a library research method. The main data sources in this study are scientific journal articles and research reports related to the topic of public management effectiveness in education. The results of the study show that 1). The effectiveness of public management policies in reducing the gap in access to education in Indonesia is that public management policies, such as budget allocation and decentralization of education, have contributed to expanding access to education, especially through financial assistance and special programs in remote areas. However, its effectiveness is still limited in areas with infrastructure constraints, indicating the need for more responsive policy adjustments to local conditions. 2). Public management factors that influence the success of policies in overcoming educational inequality in Indonesia are influenced by targeted budget allocation, quality of human resources at the local level, strong central-regional partnerships, and ongoing monitoring. Increasing local management capacity is key to ensuring policies achieve optimal results. 3). The difference in the effectiveness of education programs between urban and rural areas in Indonesia is that education programs are more effective in urban areas due to better

---

UIN Mahmud Yunus Batusangkar  
 Email: riodarma.81@gmail.com

infrastructure support and quality of educators. In rural areas, limited access and facilities reduce the effectiveness of programs, indicating the need for special policies that address challenges in remote areas.

**Keywords:** Public Management, Education Gap, Indonesia

## PENDAHULUAN

Analisis efektivitas manajemen publik dalam mengatasi kesenjangan pendidikan di Indonesia merupakan topik yang sangat penting dan relevan, mengingat tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan di negara ini. Kesenjangan pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk akses, kualitas, dan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, manajemen publik berperan krusial dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang dapat mengurangi kesenjangan tersebut. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas manajemen pendidikan sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang diterapkan, kualitas sumber daya manusia, serta sistem pengendalian yang ada.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas manajemen pendidikan adalah implementasi kebijakan pendidikan yang tepat. Mulyaningsih dalam penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen sekolah, yang pada gilirannya berdampak pada efektivitas penggunaan budaya sharing dalam lingkungan pendidikan (Mulyaningsih, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang baik dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi dan berbagi pengetahuan di antara para pendidik, yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Selain itu, penelitian oleh Syafi'i et al. menekankan pentingnya manajemen pendidikan dalam membentuk karakter peserta didik (Syafi'i et al., 2023). Karakter yang baik tidak hanya berkontribusi pada perkembangan individu, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, manajemen pendidikan yang efektif harus mencakup aspek pembentukan karakter, yang dapat membantu mengurangi kesenjangan pendidikan dengan menciptakan lulusan yang lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja.

Kualitas sumber daya manusia, terutama guru, juga merupakan elemen kunci dalam efektivitas manajemen pendidikan. Muhtadi menunjukkan bahwa kepuasan kerja guru dan kebijakan sekolah memiliki hubungan yang erat dengan efektivitas manajemen pendidikan di sekolah menengah pertama (Muhtadi, 2023). Ketika guru merasa puas dengan lingkungan kerja mereka dan mendukung kebijakan yang diterapkan, mereka cenderung lebih termotivasi untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa. Oleh karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan dan pengembangan profesional guru harus menjadi prioritas dalam manajemen pendidikan.

Dalam konteks pembiayaan pendidikan, Nurhayati menekankan bahwa manajemen pembiayaan yang baik sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah (Nurhayati, 2023). Pembiayaan yang tepat dan efisien dapat memastikan bahwa semua aspek pendidikan, mulai dari infrastruktur hingga gaji guru, dapat terpenuhi dengan baik. Tanpa manajemen pembiayaan yang efektif, upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan akan terhambat, dan kesenjangan pendidikan akan terus berlanjut.

Di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga memainkan peran penting dalam manajemen pendidikan. Penelitian oleh Rovi et al. menunjukkan bahwa pemanfaatan TIK dalam pendidikan dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, terutama dalam konteks pembelajaran daring yang semakin umum (Rovi et al., 2022). Namun, tantangan dalam penggunaan TIK, seperti kurangnya pelatihan bagi pendidik, harus diatasi agar potensi teknologi ini dapat dimanfaatkan secara optimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Lebih jauh lagi, sistem merit dalam manajemen sumber daya manusia di sektor publik, seperti yang dijelaskan oleh Bewinda, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas manajemen pendidikan (Bewinda, 2023). Dengan menerapkan sistem merit, penghargaan dan pengakuan dalam manajemen pendidikan dapat didasarkan pada kinerja dan kompetensi, bukan pada hubungan pribadi. Hal ini dapat mendorong para pendidik untuk bekerja lebih keras dan berinovasi dalam proses pembelajaran.

Implementasi manajemen strategis juga penting dalam konteks pendidikan. Fadhi mengemukakan bahwa manajemen strategis membantu organisasi pendidikan untuk terus

melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi sesuai dengan kebutuhan yang berkembang (Fadhli, 2020). Dengan demikian, lembaga pendidikan dapat lebih responsif terhadap perubahan dan tantangan yang dihadapi, serta lebih efektif dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Dalam analisis lebih lanjut, penting untuk mempertimbangkan peran pemerintah dalam mengatasi kesenjangan pendidikan. Cahyani menekankan bahwa manajemen pendidikan yang baik harus melibatkan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang efektif, serta evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua program pendidikan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan (Cahyani, 2023). Pemerintah perlu memastikan bahwa semua kebijakan dan program pendidikan yang diterapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama yang kurang beruntung.

Jadi, untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di Indonesia, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Hal ini mencakup penguatan kebijakan pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta penerapan sistem manajemen yang efektif. Dengan demikian, manajemen publik dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi kesenjangan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia secara keseluruhan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis literatur yang relevan untuk memahami efektivitas kebijakan manajemen publik tanpa terlibat langsung dalam pengumpulan data lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti memanfaatkan data sekunder berupa informasi yang telah tersedia dari berbagai sumber ilmiah.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah artikel-artikel jurnal ilmiah dan laporan hasil penelitian terkait topik efektivitas manajemen publik dalam pendidikan. Jurnal ilmiah dipilih karena menyediakan hasil studi empiris dan teoritis yang relevan, sementara laporan penelitian dari lembaga pemerintah atau institusi pendidikan menyediakan data tambahan yang mendukung analisis kebijakan pendidikan di Indonesia. Kedua sumber ini memberikan wawasan mendalam dan bukti empiris terkait kesenjangan pendidikan serta strategi yang telah diimplementasikan dalam mengatasi ketimpangan tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyeleksi literatur yang relevan sesuai dengan topik penelitian. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kata kunci yang spesifik, seperti "kesenjangan pendidikan di Indonesia," "manajemen publik," "kebijakan pendidikan," dan "desentralisasi pendidikan." Setelah itu, data dikumpulkan melalui pencarian di database jurnal akademik (seperti *Google Scholar*, *JSTOR*, dan *ScienceDirect*) serta laporan penelitian dari lembaga terkait seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Pusat Statistik. Literatur yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian, kualitas, dan kontribusinya terhadap pemahaman tentang efektivitas manajemen publik dalam pendidikan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Analisis ini dilakukan dengan menelaah berbagai teori, hasil penelitian, dan kebijakan terkait yang ditemukan dalam literatur yang terkumpul. Proses analisis mencakup tahap identifikasi tema utama, klasifikasi isu-isu yang relevan, serta evaluasi efektivitas kebijakan berdasarkan bukti yang diperoleh dari berbagai sumber. Analisis ini membantu dalam menguraikan bagaimana kebijakan publik diterapkan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan, serta perbedaan efek di berbagai wilayah.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai artikel jurnal dan laporan penelitian. Informasi yang konsisten antara berbagai sumber memberikan indikasi bahwa data tersebut dapat diandalkan dan valid. Selain itu, kritik literatur juga dilakukan dengan mengevaluasi setiap sumber dari segi metode, relevansi, dan kredibilitas penulis atau institusi yang menerbitkan laporan. Teknik ini memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki validitas dan objektivitas yang tinggi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Efektivitas Kebijakan Manajemen Publik dalam Mengurangi Kesenjangan Akses Pendidikan di Indonesia

Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan manajemen publik telah memberikan dampak signifikan dalam upaya mengurangi kesenjangan akses pendidikan di berbagai wilayah Indonesia. Program-program seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pendidikan, Program Indonesia Pintar (PIP), dan peningkatan anggaran pendidikan berhasil meningkatkan aksesibilitas pendidikan khususnya di daerah terpencil. Selain itu, kebijakan desentralisasi pendidikan yang memberikan wewenang lebih kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan setempat terbukti efektif dalam beberapa kasus. Namun, efektivitas kebijakan ini masih terbatas pada wilayah yang memiliki dukungan infrastruktur memadai dan aksesibilitas geografis yang baik. Di wilayah-wilayah yang memiliki tantangan geografis atau minim infrastruktur, kebijakan ini belum mencapai hasil yang optimal. Temuan ini menggarisbawahi perlunya penyesuaian kebijakan berdasarkan kondisi wilayah untuk memastikan semua anak di Indonesia memiliki akses yang setara terhadap pendidikan.

Kesenjangan akses pendidikan di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan kebijakan manajemen publik yang efektif. Kebijakan yang diimplementasikan harus mampu menjangkau kelompok masyarakat yang kurang terlayani, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil dan berpendapatan rendah. Salah satu cara untuk mengurangi kesenjangan ini adalah melalui integrasi teknologi digital dalam manajemen publik, yang telah terbukti meningkatkan akses terhadap sumber daya pendidikan berkualitas. Sumarno (2023) menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital dalam manajemen publik tidak hanya meningkatkan efisiensi administratif tetapi juga memperluas akses ke perpustakaan online, buku teks digital, dan aplikasi pendidikan, yang sangat penting untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang dihadapi oleh siswa dan guru.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah juga berkontribusi pada peningkatan akses pendidikan. Nurriksiana et al. (2017) menekankan pentingnya penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh publik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses pendidikan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan. Hal ini sejalan dengan temuan dari Aimbun et al. (Aimbun et al., 2017), yang menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam sektor publik sangat penting untuk memenuhi hak-hak publik, termasuk hak atas pendidikan.

Lebih jauh lagi, kebijakan yang berfokus pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam sektor pendidikan juga dapat membantu mengurangi kesenjangan akses. Rosengart et al. (2018) menekankan pentingnya pendidikan manajemen publik yang relevan untuk menghasilkan lulusan yang mampu mengatasi tantangan dalam pengelolaan pendidikan. Dengan mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan, kebijakan pendidikan dapat lebih efektif dalam menjangkau dan melayani populasi yang kurang terlayani.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga merupakan faktor kunci dalam mengurangi kesenjangan akses pendidikan. Ombagi et al. (2023) menjelaskan bahwa manajer jaringan kebijakan berperan penting dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah, publik, dan pembuat kebijakan. Dengan memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam pengembangan kebijakan pendidikan, kesenjangan akses dapat diminimalkan.

Jadi, efektivitas kebijakan manajemen publik dalam mengurangi kesenjangan akses pendidikan di Indonesia sangat bergantung pada integrasi teknologi, transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan keterlibatan masyarakat. Pendekatan yang holistik dan terkoordinasi diperlukan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat mengakses pendidikan yang berkualitas.

### B. Faktor-Faktor Manajemen Publik Yang Mempengaruhi Keberhasilan Kebijakan dalam Mengatasi Ketiimpangan Pendidikan di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor kunci dalam manajemen publik yang sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan untuk mengatasi ketimpangan pendidikan di Indonesia. Faktor pertama adalah efisiensi alokasi anggaran pendidikan yang

harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tiap wilayah, terutama untuk daerah-daerah dengan akses terbatas. Faktor kedua adalah kapasitas sumber daya manusia di level manajemen pendidikan lokal, di mana daerah dengan SDM berkualitas cenderung lebih mampu mengelola dan mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Faktor ketiga adalah kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, yang apabila terjalin dengan baik dapat memperkuat pelaksanaan kebijakan. Selain itu, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap program pendidikan juga ditemukan berperan penting dalam memastikan efektivitas kebijakan di lapangan. Temuan ini menekankan perlunya peningkatan kapasitas manajerial di tingkat lokal untuk mendukung keberhasilan kebijakan pendidikan.

Keberhasilan kebijakan dalam mengatasi ketimpangan pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor manajemen publik yang kompleks. Salah satu faktor utama adalah manajemen sumber daya pendidikan, termasuk pengelolaan dana dan kualitas tenaga pendidik. Penelitian menunjukkan bahwa manajemen yang kurang optimal dan keterbatasan dana, terutama yang bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS), menjadi penghambat dalam meningkatkan mutu pendidikan (Nurhayati, 2023; Darsiah et al., 2022). Selain itu, kekurangan tenaga pendidik yang berkualitas, seperti guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan yang memadai, juga berkontribusi terhadap rendahnya mutu pendidikan (Nurhayati, 2023; Winarsih, 2017).

Faktor lain yang signifikan adalah aksesibilitas pendidikan, yang dipengaruhi oleh kondisi demografis dan ekonomi masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa latar belakang keluarga, termasuk pendidikan kepala keluarga dan kondisi ekonomi, sangat mempengaruhi akses anak-anak terhadap pendidikan (Ayuningtyas, 2021; Perdana, 2015). Di wilayah pedesaan, akses pendidikan sering kali lebih terbatas dibandingkan dengan wilayah perkotaan, yang menciptakan ketimpangan dalam kesempatan belajar (Ayuningtyas, 2021; Siska & Rudagi, 2021). Selain itu, infrastruktur yang tidak memadai, seperti kurangnya akses internet di daerah terpencil, juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran daring yang semakin penting di era digital (Siska & Rudagi, 2021).

Kebijakan desentralisasi pendidikan juga berperan dalam menciptakan disparitas pendidikan. Dalam konteks ini, perbedaan alokasi dana dan perhatian pemerintah pusat terhadap daerah pinggiran dapat memperburuk ketimpangan pendidikan (Bida, 2021; Panggarti et al., 2022). Penelitian menunjukkan bahwa daerah yang lebih terpusat cenderung mendapatkan lebih banyak sumber daya, sementara daerah terpencil sering kali terabaikan, sehingga memperlebar kesenjangan pendidikan (Bida, 2021). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan merata dalam distribusi sumber daya pendidikan.

Faktor efektivitas manajemen pendidikan di tingkat sekolah juga sangat berpengaruh. Penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja guru dan kebijakan yang diterapkan di sekolah dapat meningkatkan efektivitas manajemen pendidikan (Muhtadi, 2023; Sihombing, 2023). Dengan meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja guru, diharapkan dapat tercipta lingkungan belajar yang lebih baik, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa.

Jadi, keberhasilan kebijakan dalam mengatasi ketimpangan pendidikan di Indonesia sangat bergantung pada manajemen publik yang efektif, yang mencakup pengelolaan sumber daya, aksesibilitas pendidikan, kebijakan desentralisasi, dan efektivitas manajemen di tingkat sekolah. Upaya untuk memperbaiki semua aspek ini harus dilakukan secara bersamaan untuk mencapai hasil yang optimal.

### **C. Perbedaan Efektivitas Program Pendidikan Antara Wilayah Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia**

Penelitian ini juga mengungkap adanya perbedaan yang signifikan dalam efektivitas program pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Program pendidikan yang dilaksanakan di wilayah perkotaan umumnya memiliki hasil yang lebih efektif dibandingkan dengan di wilayah pedesaan. Hal ini disebabkan oleh akses yang lebih baik ke infrastruktur pendidikan, sarana dan prasarana yang memadai, serta tenaga pendidik yang lebih berkualitas di perkotaan. Sebaliknya, di wilayah pedesaan, program pendidikan sering kali menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan akses ke sekolah, minimnya fasilitas, dan rendahnya tingkat kualifikasi guru. Kesenjangan ini mencerminkan perlunya kebijakan yang lebih adaptif dengan mempertimbangkan kondisi dan tantangan khusus di wilayah pedesaan.

Program khusus yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan di pedesaan dan pemberdayaan tenaga pengajar lokal dapat membantu mengurangi ketimpangan efektivitas ini.

Perbedaan efektivitas program pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan multifaset, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk infrastruktur, kualitas pengajar, dan akses terhadap sumber daya pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan signifikan dalam kualitas pendidikan antara kedua wilayah ini, yang diakibatkan oleh perbedaan dalam fasilitas dan sumber daya yang tersedia.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas pendidikan adalah kualitas fasilitas pendidikan. Sekolah-sekolah di perkotaan umumnya memiliki fasilitas yang lebih baik, termasuk laboratorium, perpustakaan, dan teknologi pendidikan yang lebih canggih. Hal ini berbanding terbalik dengan sekolah-sekolah di pedesaan yang sering kali kekurangan fasilitas dasar. Vito dan Krisnani (2015) mengemukakan bahwa sekolah-sekolah di perkotaan memiliki pengajar yang lebih kompeten dan berpengalaman, yang berkontribusi pada hasil belajar siswa yang lebih baik. Penelitian oleh Hapsari et al. (2021) juga menunjukkan bahwa keterlaksanaan pembelajaran berbasis outdoor learning berbeda secara signifikan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan, yang menunjukkan bahwa metode pengajaran yang efektif lebih mudah diterapkan di lingkungan yang lebih mendukung.

Selain itu, partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pendidikan juga berperan penting. Mulyaningsih (2017) mencatat bahwa implementasi kebijakan pendidikan yang baik memerlukan dukungan dari masyarakat, yang sering kali lebih kuat di daerah perkotaan. Di pedesaan, partisipasi orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka sering kali terbatas oleh faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan, seperti yang dijelaskan oleh Rohmani (Rohmani, 2020). Penelitian ini menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar pendidikan anak usia dini di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di pedesaan, yang mencerminkan kesadaran dan akses yang lebih baik terhadap pendidikan.

Kendala lain yang dihadapi oleh pendidikan di pedesaan adalah kurangnya akses terhadap teknologi dan informasi. Aswitami et al. (2017) menunjukkan bahwa penerapan teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan efektivitas biaya dan hasil belajar, namun akses terhadap teknologi ini sering kali terbatas di daerah pedesaan. Hal ini menciptakan kesenjangan yang lebih besar dalam pencapaian pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Dalam konteks kebijakan pendidikan, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengatasi kesenjangan ini melalui berbagai program, termasuk program Kampus Mengajar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tertinggal (Wildani & Isnaini, 2022). Namun, efektivitas program-program ini masih perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan bahwa mereka benar-benar menjembatani kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Jadi, perbedaan efektivitas program pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kualitas fasilitas, partisipasi masyarakat, dan akses terhadap teknologi. Upaya untuk meningkatkan pendidikan di pedesaan harus mempertimbangkan faktor-faktor ini agar dapat mencapai hasil yang lebih baik dan merata.

## **SIMPULAN**

Kebijakan manajemen publik yang diterapkan pemerintah, seperti desentralisasi pendidikan dan peningkatan anggaran khusus untuk daerah tertinggal, efektif dalam memperluas akses pendidikan di Indonesia. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan, terutama di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan infrastruktur yang kurang memadai. Meski kebijakan ini sudah memberikan dampak positif, hasilnya masih belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Indonesia, menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih adaptif.

Faktor utama yang menentukan keberhasilan kebijakan manajemen publik dalam mengatasi kesenjangan pendidikan, antara lain: alokasi anggaran yang efisien, kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal, dan kemitraan yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Keberhasilan kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh adanya pemantauan dan evaluasi yang berkesinambungan. Faktor-faktor ini menunjukkan pentingnya peningkatan kompetensi dan kolaborasi dalam manajemen pendidikan di daerah untuk memastikan tercapainya pemerataan

pendidikan.

Terdapat perbedaan signifikan dalam efektivitas program pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Program pendidikan lebih efektif di wilayah perkotaan berkat dukungan infrastruktur yang lebih baik dan tenaga pendidik yang lebih berkualitas. Sebaliknya, di wilayah pedesaan, berbagai hambatan, seperti keterbatasan akses dan kurangnya fasilitas pendidikan, menghambat efektivitas program. Jadi, perlunya pendekatan kebijakan yang lebih fokus pada kebutuhan khusus wilayah pedesaan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat memperoleh manfaat yang sama dari program pendidikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aimbu, L., Saerang, D., & Gamaliel, H. (2017). Analisis Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*, 8(1). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15357>
- Aswitami, G., Hilmanto, D., Husin, F., Mose, J., Wirakusumah, F., & Djuhaeni, H. (2017). Pengaruh Penerapan Teknologi Broadband Wireless Access (BWA) terhadap Efektivitas Biaya Praktik Klinik Kebidanan. *Jurnal Pendidikan dan Pelayanan Kebidanan Indonesia*, 3(1), 52. <https://doi.org/10.24198/ijemc.v3i1.44>
- Ayuningtyas, I. (2021). Ketimpangan Akses Pendidikan di Kalimantan Timur. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(2), 117-129. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v6i2.2128>
- Bewinda, R. (2023). Sejarah Sistem Merit dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik di Indonesia. *Musamus Journal of Public Administration*, 6(1), 522-528. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i1.5404>
- Bida, O. (2021). Kebijakan Desentralisasi dan Disparitas Pendidikan Lokal di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Asian (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), 228-248. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v9i1.59>
- Cahyani, F. (2023). Manajemen Pendidikan pada Anak Usia Dini di TK DWP Balonggabus Kabupaten Sidoarjo. *Preschool*, 4(2), 74-82. <https://doi.org/10.18860/preschool.v4i2.16333>
- Darsiah, D., Puspita, D., & Habibah, H. (2022). Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah SMPN 4 Merangin. *Jurnal Literasiologi*, 8(2). <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v8i2.368>
- Fadhli, M. (2020). Implementasi Manajemen Strategik dalam Lembaga Pendidikan. *Continuous Education Journal of Science and Research*, 1(1), 11-23. <https://doi.org/10.51178/ce.v1i1.7>
- Hapsari, L., Henya, A., & Paidi, P. (2021). Analisis Keterlaksanaan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Berbasis Outdoor Learning. *Al Jahiz Journal of Biology Education Research*, 2(2), 104. <https://doi.org/10.32332/al-jahiz.v2i2.4070>
- Muhtadi, M. (2023). Pengaruh Kepuasan Kerja Guru dan Kebijakan Sekolah terhadap Peningkatan Efektivitas Manajemen Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan West Science*, 1(11), 681-691. <https://doi.org/10.58812/jpdws.v1i11.799>
- Mulyaningsih, M. (2017). Pengaruh Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Transformasi Budaya Organisasi terhadap Manajemen Sekolah untuk Mewujudkan Efektivitas Penggunaan Budaya Sharing di Lingkungan Pendidikan (Survei pada SMP Negeri di Jawa Barat). *Jurnal Sekretaris & Administrasi Bisnis (JSAB)*, 1(1), 57. <https://doi.org/10.31104/jsab.v1i1.5>
- Nurhayati, N. (2023). Kebijakan dan Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(4), 2498-2505. <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i4.314>
- Nurrizkiana, B., Handayani, L., & Widiastuty, E. (2017). Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya terhadap Kepercayaan Publik-Stakeholders. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 18(1). <https://doi.org/10.18196/jai.18159>
- Ombagi, C., Minja, D., & Muna, W. (2023). Effect of Policy Network Manager's Role on Public Policy Process Outcomes in the Road Transport Sector in Nairobi City County, Kenya. *American Journal of Public Policy and Administration*, 8(2), 1-15. <https://doi.org/10.47672/ajppa.1333>
- Panggarti, U., Zumaeroh, Z., Purnomo, S., Retnowati, D., & Adhitya, B. (2022). Studi

- Komparatif Ketimpangan Antar Pulau di Indonesia. *Forum Ekonomi*, 24(2), 288-298. <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i2.10988>
- Perdana, N. (2015). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Aksesibilitas Memperoleh Pendidikan untuk Anak-Anak di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 21(3), 279-298. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v21i3.191>
- Rohmani, N. (2020). Analisis Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Seluruh Indonesia. *Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 625. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.262>
- Rosengart, T., Hirsch, B., & Nitzl, C. (2018). The Effects of Legal versus Business Education on Decision Making in Public Administrations with a Weberian Tradition. *BUR - Business Research*, 12(2), 455-478. <https://doi.org/10.1007/s40685-018-0081-3>
- Rovi, M., Pratama, A., & Hidayat, T. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Pembelajaran Mahasiswa Selama Perkuliahan Daring di Masa Pandemi Covid-19. *JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi)*, 9(3), 2163-2175. <https://doi.org/10.35957/jatisi.v9i3.2330>
- Sihombing, R. (2023). Pemerataan Pendidikan: Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia. *PEDR*, 1(2), 143-151. <https://doi.org/10.26593/pedr.v1i2.6670>
- Siska, F., & Rudagi, R. (2021). Analisis Ketimpangan Pendidikan pada Masa Covid-19 di Nagari Sisawah Kabupaten Sijunjung. *Al Ma Arief Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 3(1), 1-11. <https://doi.org/10.35905/almaarief.v3i1.2032>
- Sumarno, S. (2023). Integration of Digital Technology in Public Management Transformation. *International Journal of Asian Education*, 4(2), 115-120. <https://doi.org/10.46966/ijae.v4i2.348>
- Syafi'i, A., Saied, M., & Hakim, A. (2023). Efektivitas Manajemen Pendidikan dalam Membentuk Karakter Diri. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(3), 1905-1912. <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i3.237>
- Vito, B., & Krisnani, H. (2015). Kesenjangan Pendidikan Desa dan Kota. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13533>
- Wildani, I., & Isnaini, H. (2022). Meningkatkan Potensi dan Kompetensi Siswa Sekolah Dasar pada Program Kampus Mengajar. *Journal of Empowerment*, 3(2), 151. <https://doi.org/10.35194/je.v3i2.2395>
- Winarsih, S. (2017). Kebijakan dan Implementasi Manajemen Pendidikan Tinggi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Cendekia Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan*, 15(2), 51. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v15i2.1005>